

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan negara terpadat kelima di dunia, memiliki total 17.508 pulau, dimana sekitar 6.000 dihuni. Dan Indonesia memiliki jumlah penduduk berjumlah 264 juta jiwa berdasarkan data yang dirilis oleh PBB dan jumlah penduduk itu menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia saat ini. (Recipe, 2015)

Indonesia Sebagai Negara berkembang yang sedang berusaha menjadi Negara maju tentunya memiliki masalah dan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Indonesia ,dan berkembangnya isu-isu internasional, yang semakin dinamis memberikan dampak pada keputusan pengambilan kebijakan luar negeri setiap negara. Isu-isu yang berkembang pada era sekarang tidak hanya berfokus pada isu tradisional, seperti konflik ideologis dan perang, tetapi kini meliputi isu non-internasional. Isu non-tradisional mulai muncul pada tahun akhir 1990an, seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, proliferasi senjata pemusnah massal, demokrasi, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya yang mengancam keamanan, stabilitas nasional dan internasional. Hal ini terjadi karena proses interaksi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, tetapi munculnya aktor non-negara. dll. Termasuk Indonesia. Integrasi sebuah kerjasama multilateral sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang ada di dunia ini .Salah Satu bentuk Intergrasi nya ialah Pada 25 September 2013, di sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-67, para menteri luar negeri dari Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia bertemu untuk membahas

pembentukan sebuah grup konsultatif informal yang kemudian disebut sebagai MIKTA.

Indonesia sendiri, mengembangkan platform internasional baru terkesan tidak sesuai dengan visi "diplomasi untuk rakyat" yang menghendaki bahwa kebijakan luar negeri dapat memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini dapat dijawab dengan menyelaraskan upaya membangun MIKTA dengan pencapaian kepentingan nasional. Melalui MIKTA, Indonesia mungkin dapat menggali manfaat yang lebih banyak daripada melalui jalur bilateral dalam bekerja sama dengan Korea, Turki, Australia, dan Meksiko, jika hal ini dapat dilakukan, kita dapat mewujudkan apa yang dituliskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama para Menteri Luar Negeri Meksiko, Korea, Turki, dan Australia: *"21st Century Global Governance: Rise of the Rest."*

Apalagi, total PDB gabungan ke lima negara ini sekitar delapan persen dari ekonomi dunia dan diharapkan akan terus berkembang. Dalam pertemuan khusus dengan para wartawan MIKTA, termasuk wartawan Liputan 6 SCTV, Raymond Kaya di Canberra, Julie Bishop (Kaya, 2015) menekankan keindahan dari MIKTA adalah hubungan antar negara anggotanya yang bersifat informal dan fleksibel. Pandangan Bishop ini bisa dipahami karena masing-masing negara memiliki masalah ekonomi dan politik internasional dengan negara-negara di kawasannya. Soal Turki dengan Eropa, Meksiko dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Asean dan Korea Selatan dengan tetangganya RRT dan Jepang

Selain Mengikuti MIKTA Indonesia juga mengikuti forum kerjasama internasional lainnya seperti ASEAN, dan G20, . misalnya di ASEAN Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang merupakan forum/ organisasi kerjasama internasional regional Asia tenggara Indonesia sering dianggap

sebagai pemimpin alami Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengingat dimensi geografis, populasi besar, posisi strategis dan sumber daya alam.

Negara ini telah merasa berhak atas posisi kepemimpinan dan secara umum diakui oleh anggota ASEAN lainnya sebagai yang pertama di antara yang sederajat Indonesia secara tradisional telah diterima sebagai kebijaksanaan konvensional, sedikit perhatian diberikan pada sejauh mana Indonesia sebenarnya berhasil menjalankan kepemimpinan di ASEAN dan bagaimana upaya untuk melakukannya telah dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. (Emmers, 2014) di ASEAN Indonesia melakukan kerjasama internasional yang meliputi banyak bidang mulai dari bidang *security*, ekonomi, politik, budaya dll kerja sama internasional yang dilakukan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dan Karena Indonesia terletak di kawasan strategis di ASEAN, Indonesia dapat dan harus secara efektif terlibat di masa depan di dalam ASEAN. Indonesia telah memainkan peran kunci pada momen-momen penting dalam perkembangan ASEAN: pendiriannya pada tahun 1967 dan pengembangan perjanjian pendiriannya (1976); adopsi piagam pertama (2008).

Baru-Baru ini mengangguk pada norma-norma liberal seperti pembentukan badan hak asasi manusia regional (2009) dan deklarasi hak asasi manusia (2012). Pada KTT ke-30, Jokowi berpendapat bahwa para pemimpin ASEAN "harus memiliki keberanian untuk melihat kekuatan dan kelemahan kami sehingga akan tetap menjadi organisasi yang relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia." Dia mendesak rekan-rekannya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kejahatan transnasional. (termasuk pembajakan, penangkapan ikan ilegal dan terorisme), untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan untuk memperkuat kerja sama ekonomi. di bawah Jokowi, Indonesia mendorong

ASEAN untuk menjadi lebih efektif dan kooperatif. masalahnya adalah bahwa berbagai pejabat dan analis (baik di dalam maupun di luar Indonesia) menginginkan lebih dari ASEAN untuk beberapa waktu. (poole, 2017)

Sedangkan di G20 indonesia menjalankan politik luar negeri Indonesia telah merasa terhormat untuk menjadi anggota dari G20 yang didirikan pada tahun 1999. Indonesia merupakan satu-satunya negara perwakilan untuk Asia Tenggara, dan terpilih sebagai wakil didasarkan pada beberapa pertimbangan termasuk dida- lamnya ukuran populasi dan ekonomi. Indonesia telah terlibat dalam ekonomi yang lebih terintegrasi baik di tingkat regional seperti Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) atau internasional seperti di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Sejak masuknya Indonesia dalam G20, dukungan telah datang dari negara-negara tetangganya. Para pemimpin negara-negara anggota ASEAN memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai wakil dari Asia Tenggara. Mereka semua berharap bahwa keanggotaan bisa menyampaikan kepentingan umum dari negara-negara Asia Tenggara. Dengan kata lain, seperti yang dipromosikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di Thailand pada bulan Oktober 2009, ASEAN menetapkan posisi Indonesia sebagai mediator untuk G20 Peran ekonomi dan politik yang dimainkan oleh Indonesia sekarang bisa mengembangkan pemahaman tentang negara-negara maju dalam melihat dan memperlakukan negara-negara berkembang sebagai mitra setara untuk kerjasama global dalam hal ini penulis mencoba untuk memaparkan secara deskriptif terkait alasan kepentingan Indonesia ingin bergabung dan memperluas pengaruh polugri di forum kerjasama Internasional MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Indonesia Bergabung dan memperluas Pengaruh Polugri di Forum kerja sama internasional MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia)?

C. Kerangka Teori

1. Teori Politik Luar Negeri

Foreign Policy atau politik luar negeri merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mendapatkan suatu kepentingan tertentu. Berdasarkan pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) ialah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk menjaga, melindungi, dan membawa kepentingan nasional di dalam kancah pencaturan global .adapun cara untuk memahami konsep politik luar negeri ialah dengan cara membaginya menjadi dua bagian yaitu: politik dan luar negeri. Politik (*policy*) ialah seperangkat keputusan yang menjadi patokan untuk melakukan tindakan atau seperangkat tindakan yang bermaksud untuk memperoleh target- target yang telah dibuat terlebih dahulu sebelumnya. Sedangkan *Policy* ialah konsep “pilihan (*choices*)”: memilih tindakan atau membuat ketetapan untuk memperoleh suatu kepentingan yang ingin dicapai (Yanyan Mochamad Yani, 2010)

Sedangkan gagasan tentang kedaulatan dan rancangan “wilayah” akan memberikan usaha pemahaman konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan bisa diartikan sebaga kontrol atas wilayah (dalam) yang dikuasi oleh suatu negara.Politik luar negeri suatu negara meperlihatkan dasar dasar umum yang

digunakan negara untuk melakukan respon terhadap lingkungan (Wawolangi, 2016) internasional. oleh sebab itu *Foreign Policy* bisa dijelaskan sebagai strategi yang atau rencana perbuatan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara dalam menghadapi negara lain atau aktor hubungan internasional lain.

Dalam melakukan hubungan itu, setiap negara mempunyai *Foreign Policy*, sebagai seperangkat keputusan yang diambil dalam momen untuk meraih *national interest* suatu negara. Kondisi kondisi tertentu yang ada didalam negeri menjadi faktor terbentuknya kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk terlibat serta dalam MIKTA. Setidaknya ada tiga kepentingan nasional Indonesia yang dapat dicapai melalui keterlibatan Indonesia dalam MIKTA. Pertama, MIKTA dapat menjadi peluang bagi Indonesia menunjukkan konsistensi identitas polugri bebas-aktif dan pembentuk norma (*norms-setter*) demokrasi. Kedua, Indonesia bisa menjalankan diplomasi untuk memperluas pengaruh polugri dalam agenda-agenda global yang akan dilaksanakan di 2015, khususnya negosiasi perubahan iklim COP 21 UNFCCC di Paris. Ketiga, MIKTA dapat memfasilitasi agenda hubungan bilateral atau multilateral antarnegara anggota di dalam MIKTA.

Bergabungnya Indonesia menjadi salah satu negara MIKTA merupakan perpanjangan kebutuhan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia . MIKTA sendiri dibentuk untuk tujuan ialah memperjuangkan kepentingan bersama untuk memperkuat multilateralisme, mendukung struktur pemerintahan global yang efektif, serta memberikan dukungan terhadap stabilitas dan kesejahteraan global.

Kepentingan nasional suatu negara mampu menghasilkan berbagai kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan suatu negara,

baik dalam negeri maupun luar negeri, umumnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/ideologi yang dipegang dan ingin dicapai oleh suatu negara. Kepentingan nasional menggerakkan aktor untuk melakukan suatu interaksi dengan aktor lainnya (Saputra, 2013) Kepentingan nasional bisa adalah sejumlah tujuan suatu negara yang mengerucut untuk kepentingan yang lebih luas supaya meningkatkan dan melindungi power dari suatu negara. Setiap negara memiliki satu *National interest* yang terdiri dari beberapa kepentingan negara. Suatu negara harus menekankan dan memperhatikan satu kepentingan negara dan menunda kepentingan lainnya, dan pilihan tersebut diputuskan berdasarkan petunjuk yang berasal dari kepentingan nasional negara tersebut

Indonesia dalam memposisikan sebagai negara *middle power* atau negara Negara berkembang dengan kepentingan regional dan global (*Indonesia is middle-power* Indonesia dalam Kepemimpinan Presiden Joko Widodo bagi Indonesia, menjadi negara middlepower merupakan salah satu agenda reformasi polugri yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Pada konteks inilah MIKTA memiliki dimensi strategis *country with regional and global interests*) Setidaknya ada tiga kepentingan nasional Indonesia yang dapat dicapai melalui keterlibatan Indonesia dalam MIKTA. Pertama, MIKTA dapat menjadi peluang bagi Indonesia menunjukkan konsistensi identitas polugri bebas-aktif dan pembentuk norma (norms-setter) demokrasi. Kedua, Indonesia bisa menjalankan diplomasi untuk memperluas pengaruh polugri dalam agenda-agenda global yang akan dilaksanakan di 2015, khususnya negosiasi perubahan iklim COP 21 UNFCCC di Paris. Ketiga, MIKTA dapat memfasilitasi agenda hubungan bilateral atau trilateral antarnegara anggota MIKTA. (sehaynoevents, 2015)

Sehingga Melalui MIKTA, Indonesia mungkin dapat mendapatkan manfaat yang lebih banyak daripada hanya melalui jalur bilateral dalam bekerja sama dengan Korea, Turki, Australia, dan Meksiko. Jika hal ini dapat dilakukan, kita dapat mewujudkan apa yang dituliskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama para Menteri Luar Negeri Meksiko, Korea, Turki, dan Australia: "*21st Century Global Governance: Rise of the Rest* (news, 2016) dan sekarang Indonesia dipercaya secara resmi ditunjuk sebagai ketua kelompok negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) untuk periode 2018. Penyerahan estafet kepemimpinan tersebut dilakukan di Turki, selaku pemimpin periode sebelumnya, di Istanbul dalam Pertemuan Tingkat Menteri MIKTA ke-11 yang berlangsung pada 13 Desember 2017 kementerian Luar Negeri RI dalam siaran Pers pada Jumat (15/12/2017) (husin, 2017) menjelaskan, kekuatan Indonesia di MIKTA pada tahun 2018 akan berfokus pada isu perdamaian dan keamanan serta isu ekonomi kreatif. Tujuan tersebut selaras dengan usaha Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 dan tentunya juga usaha Indonesia untuk memajukan industri kreatif

2. Teori Organisasi Internasional

Intensitas hubungan antar negara-negara di dunia saat ini sangatlah tinggi. Kerjasama-kerjasama yang dibangun oleh setiap negara merupakan suatu upaya dalam mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Setiap negara membutuhkan negara lain demi membangun suatu kesejahteraan negaranya, tidak sedikit negara ikut bergabung dan aktif dalam suatu wadah internasional yang lebih dikenal sebagai Organisasi Internasional.

Dalam organisasi internasional, setiap negara berkumpul dalam suatu tujuan yang sama. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional tentu harus mengikuti setiap program, struktur, dan aturan yang berlaku. Pada dasarnya negara-negara yang melakukan kerjasama internasional tergabung dalam suatu komunitas internasional yang sering dikenal sebagai organisasi internasional, organisasi internasional merupakan suatu aktor penting dalam hubungan internasional. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional memiliki tujuan yang sama.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* berpendapat tentang organisasi internasional, yaitu: “Organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintahan di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelejennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.”

Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian, yaitu :“Pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek-aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.”

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (Inter-Governmental Organizations/ IGO), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO).
2. Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations / NGO), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Contoh, Palang Merah Internasional (PMI).

Saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Organisasi internasional mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini menandakan adanya keyakinan terhadap peranan yang cukup penting yang bisa dimainkan oleh organisasi internasional, hampir seluruh Negara di dunia ini berpartisipasi dalam lebih dari satu organisasi. (Sugito, 2016), salah satunya Indonesia yang mengikuti lebih dari satu organisasi internasional atau forum kerjasama internasional, seperti MIKTA, ASEAN, G20 dll., dengan mengikuti banyak organisasi internasional atau forum kerjasama internasional Indonesia bisa mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu Indonesia bisa menjalankan diplomasi untuk memperluas pengaruh politik dalam forum kerjasama internasional dan agenda-agenda global, jadi disini Indonesia menggunakan organisasi Internasional atau forum kerjasama internasional sebagai instrument untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, salah satunya melalui MIKTA Indonesia menganggap MIKTA memiliki potensi sebagai forum kerjasama internasional yang baik karena sifat MIKTA yang lebih fleksibel dan non intervensi sehingga kerjasama yang dilakukan bisa lebih optimal dan MIKTA juga memiliki Potensi kerjasama ekonomi, karena Negara- Negara MIKTA mewakili 8 persen total PDB dunia dengan potensi ekonomi 5,9 triliun dolar dan 7 persen total populasi dunia atau lebih dari 500 juta penduduk dunia, total nilai perdagangan kelima Negara tersebut USD 1,5 triliun.

3. Teori Kerjasama Internasional

Pada era zaman sekarang hampir semua transaksi dan interaksi antar negara dalam system global saat ini bersifat teratur dan hanya sedikit terjadi konflik. Berbagai macam permasalahan nasional, regional, ataupun global yang ada saat ini perlu mendapatkan tanggapan serius dari berbagai pihak.

Kebanyakan permasalahan yang terjadi, pemerintah saling berinteraksi dengan mengemukakan cara untuk solusi, negosiasi atau membicarakan tentang permasalahan yang dihadapi, membawa berbagai bukti sebagai alat untuk penyelesaian *problem* tertentu dan menyelesaikan negosiasi dengan membuat suatu perjanjian atau saling pengertian yang memberikan kepuasan bagi aktor – actor yang terlibat. Proses yang dilakukan dinamakan sebagai suatu kerjasama atau kooperasi, di dalam buku politik internasional suatu kerangka analisis K.J. Holsti mengemukakan kerjasama internasional bisa dijelaskan sebagai suatu proses semua usaha yang memungkinkan aktor internasional untuk mencapai tujuan bersama diantara actor yang terlibat seperti negara melakukan pendekatan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ingin diselesaikan melalui kedekatan negara satu dengan negara yang lain melakukan pembahasan dan negosiasi, diskusi mengenai permasalahan yang ada, mencari fakta- fakta teknis (faktor-faktor) yang memberikan solusi permasalahan alternatif dan melakukan negosiasi untuk perjanjian yang dalam pembuatannya harus ada rasa saling pengertian antara dua actor yang terlibat” (KJ, 1998) *international cooperation* bisa dilakukan dalam aspek-aspek kerjasama yang berbeda. Sebagian besar interaksi dan hubungan yang berwujud *international cooperation* berlangsung secara langsung diantara dua actor yang terlibat seperti pemerintah yang memiliki kepentingan untuk melawan permasalahan yang sama dengan cara bersama- sama.

Dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Teoritis, K.J.Hosli menjelaskan ada beberapa hal yang membuat negara melakukan *International Cooperation* dengan negara – Negara lainya

1. Untuk meningkatkan taraf ekonominya, dengan adanya kerjasama dengan actor lain seperti Negara lain ,negara tersebut bisa melakukan pengurangan biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan kegiatan suatu produk yang dibutuhkan bagi rakyatnya karena kekurangan yang ada di negara tersebut
2. mengurangi biaya yang dikeluarkan.
3. Disebabkan adanya permasalahan yang dapat mengancam *security*.
4. Agar bisa melakukan pengurangan kerugian negatif yang disebabkan oleh perbuatan individu negara yang memberi dampak kepada actor lain seperti negara – negara lain.

Kerjasama internasional ialah upaya *actor* internasional seperti negara untuk menyeuaikan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga sebagaiwujud keadaan masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. kerjasama internasional berlaku pada kondisi yang sifatnyadesentralisasi yang tidak mempunyai lembaga dan aturan-aturan yang berguna untuk unit-unit yang berlainan secara kebudayaan dan dipisahkan secara geografis, sehingga yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan tidak cukupnya pemberintahan megenai dorongan dan kepentingan dari bermacam golongan sangat berharga. Hubungan yang dilakukan secara tidak berhenti,banyaknya komunikasi yang dilakukan antar negara- negara dalam wujud pertukaran informasi yang berkenaan kepentingan kerjasama, dan perkembangan bermacam- macam lembaga yang masih belum baik dimana bentuk-bentuk kerjasama melukiskan bagian-

bagian didalam teori kerjasama bersumber kepada kepentingan sendiri didalam system internasional yang bersifat kejam ini MIKTA ialah bentuk intergrasi sebuah forum kerjasama multilateral negara-negara berkembang yang dibuat untuk menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang ada di dunia ini .Salah Satu bentuk Intergrasi nya ialah Pada 25 September 2013, di sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-67, para menteri luar negeri dari Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia bertemu untuk membahas pembentukan sebuah grup konsultatif informal yang kemudian disebut sebagai MIKTA.

Sejak saat itu, MIKTA dianggap sebagai kumpulan negara middle power yang memiliki agenda bagi kepentingan global.. Dideklarasikan pada September 2013, MIKTA (singkatan dari nama negara-negara anggotanya: Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia) diharapkan dapat memberikan ruang bagi penciptaan tata kelola global yang tidak hanya memperhatikan kepentingan negara-negara besar atau Adikuasa tersebut

Kesamaan yang dimiliki Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia meskipun Negara-negara tersebut memiliki banyak perbedaan, namun bersama-sama ingin memproyeksikan dirinya sebsagai aktor-aktor yang signifikan di dunia. Mewakili populasi mencapai 530 juta dan meliputi delapan persen GDP dunia, akan memposisikan negara-negara tersebut di atas sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia. Lima Menteri Luar Negeri pada tanggal 25 September 2013 telah bertemu di sela-sela the 68th *General Assembly of the United Nations*. lima negara ini memyusun suatu kelompok informal tunggal menurut berbagai kesamaan yaitu, *share* perekonomian yang memiliki kemiripan, dan tugas yang sama dijalankan di wilayah yang diwakili, dan MIKTA akan menjadi kelompok informal yang mejelaskan kelompok mereka sendiri sebagai *middle powers* yang saling bekerja sama untuk mempunyai

andil dalam pembentukan komunitas internasional. (Leonard F. Hutabarat, 2017),

MIKTA akan menjadi representasi dari mayoritas negara di dunia di dalam G-20. kelima negara ini paling tidak memiliki pengaruh dikawasannya masing-masing, seperti Indonesia yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia Tenggara. Meski ke lima negara memiliki banyak perbedaan, tapi menurut pandangan Bishop ke limanya bisa saling melengkapi kekurangan yang ada antar anggota MIKTA dengan kelebihan yang dimiliki masing – masing Negara anggota MIKTA

MIKTA memiliki tujuh sektor utama kerja sama, yang meliputi kerjasama memerangi terorisme, komersil, dan ekonomi, energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan jenis kelamin (gender), operasi memelihara kedamaian dunia, tata kelola pemerintahan dan demokrasi yang baik. Dari tujuh sektor utama MIKTA, tugas yang diutamakan oleh Turki sebagai ketua di saat menjabat sebelumnya adalah memerangi terorisme, kerja sama perekonomian antar negara, dan menangani masalah *Refugees*. Pada saat turki menjabat sebagai ketua, Turki telah sukses memelopori diselenggarakannya Konsultasi Perencanaan Kebijakan MIKTA sebagai program adalan Turki. Sedangkan pada periode saat Indonesia menjabat sebagai ketua di MIKTA pada tahun 2018 akan berpusat pada isu *Security* dan membahas tentang ekonomi kreatif. (Times Indonesia, 2017) Jadi kerjasama internasional sangat penting bagi Negara – negara berkembang seperti Negara anggota MIKTA untuk lepas dari bayang – bayang negara adikuasa.

D. Hipotesa

Indonesia bergabung dan memperluas pengaruh di forum kerjasama Internasional MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia) karena untuk mencapai kepentingan nasional yaitu,

1. Indonesia bisa menjalankan diplomasi untuk memperluas pengaruh politik luar negeri dalam forum kerjasama internasional dan agenda-agenda global, seperti MIKTA, G20 dan ASEAN.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, penulis memberikan batasan-batasan dalam menganalisa studi kasus yang sedang diteliti. Pembahasan pada skripsi ini akan dibatasi pada awal Indonesia masuk menjadi salah satu negara anggota MIKTA tahun 2013 sampai Indonesia menjadi ketua MIKTA pada tahun 2018.

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah Mendeskripsikan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi Indonesia bergabung menjadi salah satu Negara anggota MIKTA

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menjelaskan fenomena diatas adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis karena objek penelitian yang akan dikaji bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis data dalam *Research* ini penulis mengambil jenis data sekunder.

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang bersumber dari media cetak (buku, jurnal, koran, artikel, dll) serta media elektronik (website, *e-book*, dll) yang relevan dengan topik bahasan Penelitian. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deduktif. Penulis menggunakan sebuah teori yang dilanjutkan dengan pencarian data yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencari suatu korelasi dan dapat menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta yang ada.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan, Konten yang akan dibahas pada bab ini meliputi latar belakang , Rumusan masalah, pembahasan teori yang digunakan, jawaban sementara, ,Jangkauan Peneliti, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian , dan sistematika Penulisan

BAB II: Politik Luar negeri Indonesia terhadap Forum kerjasama internasional.

BAB III: akan membahas mengenai profil sejarah MIKTA sebagai forum kerjasama internasional Negara berkembang.

BAB IV: akan membahas mengenai kepentingan Indonesia bergabung menjadi salah satu Negara Anggota MIKTA.

BAB V: Kesimpulan, bab ini Berisi Kesimpulan hasil analisa dalam rangka menjawab Tujuan penelitian yang fdiajukan dan Saran – saran atau rekomendasi dari hasil penelitian dan temuan- temuan dalam penyusunan skripsi.